

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring yaitu Webex di bidang Pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan :

1. Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan bidang Seksi Kefarmasian memiliki beberapa Program Kebijakan yang terdiri Program Tata Kelola Obat Publik, Program Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional (POR), Program Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Program Obat Tradisional, Program Kosmetika dan Program Makanan dan Minuman.
2. Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan bidang Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga memiliki tugas yang berfokus pada penyusunan kebijakan serta pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
3. Apoteker memiliki peranan yang penting dalam mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam hidup sehat serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata pada masyarakat luas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring dengan aplikasi Webex dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pembuatan aplikasi Dinkes di *gadget* yang memuat seluruh informasi mengenai Dinas Kesehatan khususnya di Jawa Timur sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
2. Peningkatan penyuluhan dan informasi yang selalu diperbarui mengenai obat maupun alat kesehatan atau berita terbaru terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNN, 2009, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, Jakarta: BNN RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan :Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2015, Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman, GNPOPA: Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman.
- Dinkes Provinsi Jatim, 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Depkes RI : Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, Depkes RI : Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003, Instrumen Stratifikasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang

- republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, DepKes RI : Jakarta.
- Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019, “Tata Cara Pengajuan Sertifikat Produksi Kosmetika, Sertifikat Industri Ekstrak Bahan Alam dan Sertifikat Produksi Obat Tradisional Melalui e-Licensing, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gubernur Jawa Timur, 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Hidayat, 2007, Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data, Jakarta: Salemba Medika.
- <https://farmalkes.kemkes.go.id/pelayanan/if/>
- <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/sumatera-barat/rekomendasi-izin-usaha-industri-farmasi-pembaharuan-dan-pergantian-penanggung-jawab>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2011, Modul Penggunaan Obat Rasional, Jakarta: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian.

- Kepmenkes RI, 2015, Peraturan Kementrian Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika,psikotropika dan prekursor farmasi, Jakarta.
- Martono, Lidya Harlina dan Joewana, Satya. (2008). Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya. Jakarta: Balai Pustaka.
- Menteri Kesehatan, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/BVIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitri dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/688/2019 Tentang Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/817/2019 Tentang Formularium Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan

- Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Presiden RI, 2003, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Jakarta: Deputy Sekretaris Kabinet RI.
- Partodiharjo, S., 2008, Kenali NARKOBA dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 tahun 2016, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Peraturan Pemerintah, 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Sekretariat Negara: Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2012, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara : Jakarta.
- Presiden RI, 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Presiden RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta:

Lembaga Negara Republik Indonesia.

Presiden RI, 2012, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Sumiyati, 2009, Asuhan Keperawatan Pada Korban Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA, Jakarta

Syarifuddin, G., 2013, Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan, Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET).

Taufik, 2007, Therapeutic Community sebagai Metode Pembinaan, Yogyakarta: Bima Nusantara.